

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor bahan pokok konsumen merupakan sektor yang akan terus tumbuh meskipun mendapat tekanan dari kenaikan harga komoditas akibat pelemahan rupiah, inflasi dan kenaikan suku bunga. Dengan tingginya tingkat konsumsi masyarakat, sektor industri khususnya yang melayani kebutuhan konsumen menghadapi peningkatan permintaan konsumen. Dari berbagai subsektor industri untuk bahan pokok konsumen saat ini, sektor farmasi paling dibutuhkan dan juga selama ini diketahui bahwasanya industri farmasi Indonesia masih mengimpor bahan baku dalam jumlah besar. Hampir mayoritas daripada penggunaan bahan baku yang dipergunakan untuk menciptakan bahan kimia dan obat-obatan masih di impor dari Negara – negara terdekat termasuk China, India, Jepang dan berbagai negara Eropa. Meningkatnya volume impor bahan baku berdampak signifikan terhadap kenaikan biaya keagenan perusahaan dan memerlukan tindakan yang efektif dari pelaku industri.

Pemegang saham dan manajemen adalah dua mitra penting dalam mengoperasikan bisnis di dalam sebuah perusahaan. Tugas dari pemegang saham yaitu seseorang pemangku kepentingan utama di sebuah perusahaan yang memiliki tanggung jawab serta kewajiban yang dapat mereka selesaikan, sedangkan manajemen memiliki tugas yaitu seseorang yang bertanggung jawab dalam suatu bisnis perusahaan. Berdasarkan filosofi keagenan, para pemangku kebijakan dan juga para pemegang saham yang memiliki urusan yang penting dari

pihak lainnya, menurut *Lukviarman* (2016) mengklaim bahwasanya ahli teori agensi membuat premis bahwasanya para pemilik saham dan juga manajemen yang memiliki kaitan serta kepentingan lainnya yang tidak sama yang berdasarkan sudut pandang dari masing pihak, sehingga terdapat masalah keagenan yang dihasilkan dari konflik kepentingan kedua belah pihak sehingga muncul biaya keagenan yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Jensen dan Meckling (1976) mendeskripsikan terkait dengan biaya keagenan yang memiliki definisi yaitu total dari biaya yang dianggarkan para pemilik saham yang diperuntukkan untuk hal pengawasan dari perusahaan, pemegang saham menanggung biaya yang dikeluarkan manajemen ketika membeli beberapa perusahaan untuk meningkatkan otoritasnya atau mengeluarkan uang untuk proyek yang disukai daripada mengoptimalkan nilai di dalam perusahaannya. Jika pengawasannya tepat maka dapat menyeimbangkan kepentingan kedua belah pihak, sehingga kesulitan keagenan antara manajer dan pemegang saham dapat dikelola, menurut *Haruman* (2008) mengklaim bahwasanya ada sejumlah opsi yang tersedia untuk memotong biaya agensi yaitu kepemilikan saham institusional dan manajemen. Definisi dari hak milik dari institusional memiliki arti bahwasannya persentase dari pembagian saham yang diakui oleh berbagai organisasi seperti contoh perusahaan yang bergerak dibidang bank, asuransi ataupun perusahaan lainnya yang ada pada akhir periode tahun (*Tarjo*, 2008).

Dengan adanya metode dari hak milik dari institusional maka akan membangkitkan rasa awas yang lebih efektif. Hak milik dari institusional juga

mempunyai tujuan dalam pengelolaan pengawasan, dikarenakan proporsi dari hak milik dari institusional adalah suatu sumber utama dari kekuatan yang bisa untuk dipakai terkait hal mengendalikan setiap keputusan manajemen sehingga mengurangi biaya keagenan perusahaan, ini menunjukkan kemampuannya untuk memantau manajemen untuk mencegahnya mencoba bertindak untuk kepentingannya sendiri atau untuk melaksanakan penipuan. Menurut Menurut *Mohd dkk.* (1998) berpendapat kepemilikan saham institusional akan mengoptimalkan pengawasan seberapa baik kinerja insider dan keuntungan perusahaan juga akan meningkat karena dampak kepemilikan saham institusional ini, yang menyebabkan nilai perusahaan (PER) meningkat seiring dengan baik.

Perwakilan daripada komisaris independen adalah bagian dari dewan yang tidak memiliki posisi ataupun relasi yang secara langsung berhubungan dengan pihak perusahaan maka hal tersebutlah apabila terkait dengan pengambilan keputusan perwakilan daripada komisaris independen biasanya netral untuk menghindari konflik kepentingan antara *principal* dan penanggung jawab. Dengan kata lain, keberadaan perwakilan daripada komisaris independen dapat membantu pengawasan sehingga pengelolaan aset perusahaan menjadi lebih efisien dalam menurunkan biaya keagenan. Perwakilan daripada komisaris independen mempunyai tugas memandu pilihan dari pemangku kebijakan perusahaan dan juga jalannya operasional dari suatu perusahaan, lalu selain itu memberikan arahan ke dewan direksi perusahaan dan memastikan penerapan GCG. Perusahaan terbuka harus memiliki 30% komisaris independen untuk penerapan sistem tata kelola perusahaan yang baik, sesuai dengan keputusan Kep.315/BEJ/06-2000 tentang

Pencatatan Efek dan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 Direksi Bursa Efek Jakarta. Penerapan tata kelola perusahaan (GCG) diperkirakan dapat mengurangi masalah keagenan. Menurut *Sudana* (2015), salah satu metode pengawasan dalam mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer ialah penunjukan komisaris independen. Sedangkan menurut *Core dkk.* (1999) mengatakan bahwasanya jika sistem tata kelola perusahaan melemah, perusahaan akan dikenakan biaya keagenan yang tinggi. Akibatnya, kehadiran komisaris independen diperkirakan akan mengurangi keagenan perusahaan.

Hak milik institusional yang diteliti oleh *Yuliandini dkk* (2020) mengatakan hak milik dari institusional memiliki dampak negatif pada biaya keagenan hal itu bertentangan dengan temuan penelitian *Harahap* (2017) menunjukkan bahwasanya hak milik dari institusional tidak berpengaruh pada biaya agensi.

Sanjaya dan Christianti (2012) menyimpulkan terdapat dampak negatif terhadap biaya keagenan dalam perwakilan daripada komisaris independen. Bertentangan dengan temuan penelitian *Hadiprajitno* (2013), *Siregar dkk* (2014), dan *Hastori dkk* (2015), yang mengklaim bahwasanya komisaris independen memiliki dampak yang positif pada biaya keagenan.

Penulis terdorong untuk meneliti mengenai **“Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”** berdasarkan fenomena yang telah terjadi dari peneliti sebelumnya.

B. Rumusan Masalah

Terdapat masalah dalam penelitian ini yang di kemukakan sebagai berikut dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah di berikan :

1. Apakah hak milik dari institusional berpengaruh signifikan terhadap *agency cost* bagi perusahaan farmasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia?
2. Apakah perwakilan daripada komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *agency cost* bagi perusahaan farmasi yang terdaftar di bursa efek indonesia?
3. Apakah perwakilan daripada dewan komisaris independen dan hak milik dari institusional berpengaruh simultan pada *agency cost*?

C. Batasan Masalah

Menurut latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka penulis menentukan apa saja fokus masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. penelitian ini menggunakan data perusahaan farmasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia.
2. penelitian ini menggunakan 3 variabel yaitu hak milik institusional, perwakilan daripada komisaris independen dan *agency cost*.

D. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji apakah hak milik institusional mempunyai pengaruh *agency cost* bagi perusahaan farmasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia.

2. Mengkaji apakah perwakilan daripada komisaris independen mempunyai pengaruh *agency cost* bagi perusahaan farmasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia.

3. Mengkaji apakah perwakilan daripada komisaris independen dan hak milik institusional mempunyai pengaruh *agency cost* secara simultan bagi perusahaan farmasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Menurut hasil penelitian, diharapkan bisa memberikan beberapa manfaat yaitu:

1. Menyediakan data hak milik dari institusional, perwakilan daripada komisaris independen dan *agency cost* yang berguna untuk studi ekonomi di masa depan oleh akademis dan praktisi.

2. Hal ini dimaksudkan untuk membantu memajukan teori, khususnya yang berkaitan dengan praktik pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan.

3. Untuk pemegang saham, memberi gambaran tentang *agency cost* yang mengakibatkan penurunan kinerja perusahaan dan kesejahteraan pemegang saham.